

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

LKjIP yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta partisipasi penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, nilai rata-rata capaiannya sebesar 100 % atau sangat baik.

Secara umum, Bagian Organisasi telah dapat melaksanakan target yang telah ditetapkan dengan dukungan program/kegiatan yang ada. Disamping itu ada 2 (dua) hal yang setidaknya menjadi program prioritas di Bagian Organisasi dapat diselesaikan yaitu Perubahan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan peningkatan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, Bagian Organisasi tetap berupaya lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Organisasi .

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LKjIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Bagian Organisasi.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

I.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Bagian Organisasi merupakan salah satu Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui koordinasi Asisten Bidang Administrasi dan Umum dalam rangka memberikan fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, fasilitasi pelayanan publik, pengembangan kinerja, pelaksanaan analisa jabatan dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Adapun Struktur Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Bagian ;
- b. Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab ;
- c. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik ;
- d. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, administrasi pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan budaya kerja, Standar Manajemen Mutu (SMM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Adapun tugas-tugas secara rincinya adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan analisis data di bidang kelembagaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis organisasi Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang analisis organisasi Perangkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan
 - f. petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis organisasi Perangkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan standar kompetensi jabatan dan dan peta jabatan;

- j. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang analisis organisasi Perangkat Daerah;
 - k. menyiapkan bahan analisis data di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - o. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi analisis organisasi dan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - q. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi analisis organisasi dan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan, serta analisis beban kerja dan peta jabatan;
 - s. menyiapkan bahan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi analisis organisasi dan kapasitas Perangkat Daerah;
 - t. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyusunan tugas fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah;
 - u. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
2. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan kinerja, reformasi birokrasi dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi;

- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. menyiapkan bahan analisis data dan bahan di bidang pengembangan kinerja, reformasi birokrasi dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
 - f. menyiapkan bahan analisis, perumusan kebijakan, petunjuk pelaksanaan data dan bahan di bidang akuntabilitas kinerja;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang akuntabilitas kinerja;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang peningkatan kinerja dan budaya kerja serta standar manajemen mutu;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil evaluasi peningkatan kinerja, reformasi birokrasi, budaya kerja, dan standar manajemen mutu serta akuntabilitas kinerja;
 - l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan LPPD, LKPJ lingkup Bagian;
 - m. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - n. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lain yang yang diberikan Kepala Bagian.
3. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan analisis data di bidang tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tatalaksana pemerintahan dan pengawasan melekat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan dan pelayanan publik;

- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan prasarana dinas serta pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tatalaksana pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- i. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
- j. melaksanakan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. melaksanakan dan fasilitasi penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan dasar Pemerintah Daerah;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- m. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. menyiapkan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala.
- o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

a. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi

1. Visi

“Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera“.

2. Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima yakni :

“ Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil “

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Mewujudkan Organisasi yang efektif dan efisien

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
- b. Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan;
- c. Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- e. Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi.

Rencana Kinerja

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran dimaksud.

1. Kebijakan

- a. Melaksanakan Penyusunan SOP
- b. Melaksanakan Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah
- c. Melaksanakan Penyusunan Instrumen Anjab ABK
- d. Melaksanakan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- e. Melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
- f. Melaksanakan Survey IKM
- g. Melaksanakan Lomba Inovasi Pelayanan Publik

2. Program

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Pembinaan dan pengembangan aparatur;
- c. Pengembangan Kinerja Perangkat Tidur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan;
- e. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- f. Pelayanan administrasi perkantoran

3. Kegiatan

- a. Survei indeks kepuasan masyarakat;
- b. Pengembangan Ketatalaksanaan ;
- c. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintah Daerah ;
- e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- f. Budaya Kinerja Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan Reformasi Birokrasi;
- h. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS ;
- i. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

4. Jangka Pendek

- a. Menyempurnakan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional dari setiap lembaga yang ada sesuai dengan perkembangan
- b. Menyempurnakan tugas pokok dan fungsi lembaga perangkat daerah.
- c. Menyusun Lembaga Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.
- d. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan di bidang ketatalaksanaan.
- e. Menyempurnakan petunjuk tentang tentang system, metode dan prosedur kerja.
- f. Melaksanakan analisis jabatan pada lembaga perangkat daerah.
- g. Mentransfer informasi jabatan untuk kepentingan bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- h. Menyusun petunjuk teknis di bidang penyusunan, pengolahan dan penyajian data informasi jabatan.

5. Jangka Panjang

Disamping melanjutkan program jangka pendek yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, juga mengadakan kajian di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan formasi jabatan serta bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

b. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	- Rata-rata Nilai IKM - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik	78,2 38%
2	Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	- Persentase perangkat daerah yang Ketatalaksanaanya baik	52%

3	Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	- Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	40%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai 10,1
5	Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase KBK Aktif - Nilai RB bidang <ul style="list-style-type: none"> • Ketatalaksanaan • Penataan dan penguatan organisasi • Pelayanan publik • Akuntabilitas Kinerja 	<p>25%</p> <p>3,6</p> <p>5,3</p> <p>5,2</p> <p>4,85</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bagian Organisasi Tahun 2019, secara sistematis terdiri dari pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan pembahasan analisis capaian kinerja sampai dengan evaluasi kendala dan tindak lanjut kebijakan yang diambil dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan teknik dan format Pengukuran Kinerja, Bagian melakukan pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hasil Pengukuran Kinerja seluruh sasaran strategis tersebut tersaji dalam Lampiran 3 (tiga) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi di bawah ini dengan aspek penilaian sebagai berikut :

No	Prosentase Capaian	Kategori Capaian
1.	85% s/d 100%	Baik Sekali
2.	70% s/d < 85%	Baik
3.	55% s.d <70%	Cukup Baik
4.	<55%	Kurang Baik

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	- Rata-rata Nilai IKM - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan	78,2 38%	79,41 47%	100,01% 123%

		publik			
2	Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	- Persentase perangkat daerah yang Ketatalaksanaanya baik	52%	58%	111%
3	Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	- Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	40%	30%	75%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai 10,1	Nilai 11,65	115,3%
5	Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi	- Persentase KBK Aktif - Nilai RB bidang <ul style="list-style-type: none"> • Ketatalaksanaan • Penataan dan penguatan organisasi • Pelayanan publik • Akuntabilitas Kinerja 	25% 3,6 5,3 5,2 4,85	25% 1,65 1,49 2,48 2,14	100% 45,8% 28,1% 47,6% 47,7

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1

Untuk mewujudkan sasaran strategis “*meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat*” telah dirumuskan 2 (dua) indikator yang capaian rata-rata sebesar 100 % yang rincian capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019			Capaian Tahun 2018
	Target	Realisasi	Capaian	
• Rata - rata nilai IKM	78,2%	79,41%	100,1%	100%
• Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik	38%	47%	123 %	100%
Rata-rata	58,1%	63,2%	111,5%	100%

Indikator Rata-rata nilai IKM capaiannya sebesar 100 %. Setiap tahun, Bagian Organisasi Setda selalu melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Sekretariat daerah Kabupaten sedangkan nilai rata-rata IKM untuk Kabupaten diperoleh dari hasil survey IKM yang dilaksanakan oleh semua OPD. Hanya saja yang masih perlu dibenahi adalah obyektivitas dalam pengisian kuesioner, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang valid. Disamping itu, untuk analisis data juga masih perlu dibenahi sehingga rekomendasi yang disampaikan benar untuk ditindaklanjuti dan bermafaat bagi SKPD .

- Indikator “Prosentase Perangkat daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik ” pada tahun 2019 ini capaiannya sebesar 123 %. Pada Tahun 2019 ini Kabupaten Magetan berhasil mendapat predikat Top 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sasaran 2

Untuk mewujudkan sasaran strategis “*meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah*” telah dirumuskan 1 (satu) indikator yang capaian rata-rata sebesar 100 % yang rincian capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2019			Capaian tahun 2019
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perangkat daerah yang ketatalaksanaannya baik	52%	58%	111 %	111%
Rata – rata	52%	58%	111 %	111%

- Untuk mencapai target dari indikator Persentase perangkat daerah yang ketatalaksanaannya baik maka pada tahun 2019 ini Bagian Organisasi melaksanakan Bimtek penyusunan Proses Bisnis bagi semua OPD yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Kegiatan ini dilaksanakan agar semua OPD dapat menyusun Proses Bisnis sekaligus SOP dengan baik dan benar.

Sasaran 3

Untuk mewujudkan sasaran strategis “**kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK**” telah dirumuskan dengan 1 (satu) indikator yang capaian rata-rata sebesar 75 % yang rincian capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2019			Capaian 2019
	Target	Realisasi	Capaian	
• Persentase Perangkat Daerah yang kelebagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	40%	30%	75%	75%
Rata – rata	40%	30%	75%	75%

- Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan. Yang telah dilakukan validasi evaluasi jabatan nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan dalam program kepegawaian, seperti : Penyusunan Formasi, Sistem Karier, Kinerja, Pemberian Tunjangan Serta Sistem Penggajian. Hasil Evaluasi Jabatan didukung dengan Data hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan oleh Kementrian PAN RB. Untuk kedepan karena adanya perubahan terkait data kepegawaian maka untuk selanjutnya akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Anjab ABK untuk mendapatkan informasi Jabatan. Untuk pelaksanaan analisis jabatan pada tahun 2019 ini kami bekerjasama dengan penyusun Anjab ABK di lingkup Kabupaten Magetan.

Capaian kinerja sasaran ini didukung program / kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Kegiatan	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah	130.000.000	100.660.885	77,43
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	70.000.000	60.188.582	85,98
Rata-rata	200.000.000	160.849.467	81,70

Sasaran 4

Untuk mewujudkan sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”** telah dirumuskan dengan 1 (satu) indikator yang capaiannya sebesar 115 % yang rincian capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2019			Capaian tahun 2019
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	10,01	11,65	115 %	115%
Rata – rata	10,01	11,65	115 %	115%

- Indikator **“ Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja”** capaian sebesar 115 %. Pada tahun 2019 ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan oleh Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan memperoleh nilai 68,94 atau kategori B, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang dengan nilai 63,84.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan pelaporan kinerja dengan baik dan benar adalah :

- Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan stake holder utama penyusun SAKIP yaitu Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda ;
- Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada SKPD tentang pentingnya peningkatan kualitas SAKIP ;
- Menjalin kerjasama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dengan upaya asistensi SAKIP ;
- Menjalin kerjasama dengan Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Timur dengan upaya pendampingan penyusunan IKU ;

Kendala yang dihadapi diantaranya :

- Masih kurangnya komitmen pimpinan tentang arti pentingnya SAKIP ;
- Masih kurangnya harmonisasi antara dokumen yang ada, baik di Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja dan dokumen yang lain ;

- c. Perlu adanya manajemen pengumpulan dan pengelolaan data kinerja sehingga dapat dipergunakan untuk pengukuran dan pemanfaatan kinerja;

Capaian kinerja sasaran diatas didukung program / kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Kegiatan	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	295.000.000,-	252.381.937,-	85,55
Rata – rata	295.000.000,-	252.381.937,-	85,55

Sasaran 5

Untuk mewujudkan sasaran strategis “ **Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi**” telah dirumuskan dengan 2 (dua) indikator yang rincian capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2019			Capaian tahun 2019
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase KBK aktif	10,01	11,65	115 %	115%
Nilai RB bidang, ketatalaksanaan, penataan dan penguatan organisasi, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja	3,6	1,65	45,8	45,8
	5,3	1,49	28,1	28,1
	5,2	2,48	47,6	47,6
	4,8	2,14	47,7	47,7

- Indikator “Prosentase KBK aktif” pada tahun 2019 capaian sebesar 115 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Bagian Organisasi setiap tahun melaksanakan bimbingan teknis kepada semua SKPD dalam menyusun Risalah Budaya Kinerja yang kemudian setelah melalui seleksi dan dipilih beberapa risalah yang terbaik untuk diikuti kompetisi Budaya Kinerja tingkat Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan pada tahun 2019 ini Tim KBK dari Puskesmas Karangrejo mendapat predikat harapan 1 terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur.
- Untuk kegiatan Reformasi Birokrasi penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Bagian Organisasi melaksanakan penyusunan secara mandiri dan telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas melaksanakan

rencana aksi sesuai dengan kelompok kerja masing-masing, selain itu pada tahun 2019 ini Bagian Organisasi bekerjasama dengan Inspektorat telah melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Capaian kinerja sasaran diatas didukung program / kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Kegiatan	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kegiatan Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	70.000.000,-	60.348.140,-	86,21
Kegiatan Pengembangan Reformasi Birokrasi	100.000.000,-	64.379.012,-	64,38
Rata – rata	155.000.000,-	125.703.029,-	75,29

C. Akuntabilitas Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata Nilai IKM - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik 	140.000.000 130.000.000	132.498.392 122.167.208	94,64 93,97
Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase perangkat daerah yang Ketatalaksananya baik 	83.000.000	72.294.588	87,10
Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku 	70.000.000	60.188.582	85,98
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja 	295.000.000	252.381.937	81,10
Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase KBK Aktif - Nilai RB bidang <ul style="list-style-type: none"> • Ketatalaksanaan • Penataan dan penguatan organisasi • Pelayanan publik • Akuntabilitas Kinerja 	70.000.000 100.000.000	60.348.140 64.379.012	86,21 64,38
Rata - rata		923.000.000	889.882.444	96,41%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Bagian Organisasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis rata-rata telah tercapai 100% atau telah direalisasikan dengan sangat berhasil. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk lebih baik.

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	- Rata-rata Nilai IKM - Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik	78,2 38%	79,41 47%	100,01% 123%
2	Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	- Persentase perangkat daerah yang Ketatalaksanaanya baik	52%	58%	111%
3	Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	- Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	40%	30%	75%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai 10,1	Nilai 11,65	115,3%
5	Meningkatnya pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi	- Persentase KBK Aktif - Nilai RB bidang <ul style="list-style-type: none"> • Ketatalaksanaan • Penataan dan penguatan organisasi • Pelayanan publik • Akuntabilitas Kinerja 	25% 3,6 5,3 5,2 4,85	25% 1,65 1,49 2,48 2,14	100% 45,8% 28,1% 47,6% 47,7